



BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, perlu disusun pedoman penilaian Administrasi Pemerintahan Desa dalam upaya pembinaan dan tertib administrasi Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Administrasi Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, dan Pengesahan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Bupati adalah Bupati Demak;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
4. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
10. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa;
11. Administrasi Umum adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum;
12. Administrasi Penduduk adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Penduduk;
13. Administrasi Keuangan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Keuangan;
14. Administrasi Pembangunan adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Pembangunan;
15. Administrasi Permusyawaratan Desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
16. Penilaian Administrasi Pemerintahan Desa adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam indikator untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan desa.

BAB II

JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA

Bagian Kesatu

Jenis Administrasi Desa

Pasal 2

Jenis Administrasi Desa yaitu meliputi :


1. Administrasi Umum;
2. Administrasi Penduduk;
3. Administrasi Keuangan;
4. Administrasi Pembangunan;
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Administrasi Lainnya, yaitu :
 - a. Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); *A*

- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Mekanisme dan pelaksanaan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Bentuk Administrasi Desa

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari :
 - a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Data Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Data Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Ekspedisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari :
 - a. Buku Anggaran Penerimaan;
 - b. Buku Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - c. Buku Anggaran Belanja Langsung;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran;
 - g. Buku Kas Pembantu Pajak (PPH / PPN)
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 terdiri dari :
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek; dan
 - d. Buku Kader-Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bentuk Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 terdiri dari :
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Data Keputusan BPD;
 - c. Buku Data Kegiatan BPD; 

- d. Buku Agenda BPD; dan
 - e. Buku Ekspedisi BPD.
- (6) Administrasi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 terdiri dari :
- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes;
 - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes;
 - d. Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa/ Bengkok Perangkat Desa Kosong;
 - e. Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - h. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes);
 - i. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD;
 - j. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPDes);
 - k. Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
 - l. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran desa.

BAB III

PELAKSANAAN ADMINISTRASI DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai Penanggungjawab terhadap pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wajib memberdayakan Perangkat Desa;
- (2) Dalam memberdayakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan jabatan masing-masing Perangkat Desa, di bawah koordinasi Sekretaris Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa berpedoman pada masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diikuti dengan pencatatan dalam Buku Administrasi;
- (2) Buku Administrasi Desa diisi oleh Perangkat Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing .

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pengisian buku administrasi desa dalam pelaksanaannya dilaporkan kepada Camat secara rutin sebelum tanggal 5 setiap bulannya; 4

- (2) Laporan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Laporan Kependudukan;
 - b. Laporan Situasi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Laporan Harian Kepala Desa;
 - d. Laporan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC);

BAB V

PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 7

- (1) Penilaian administrasi dilakukan oleh Tim Kabupaten dan pihak Kecamatan secara periodik ;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Penilaian administrasi;
 - b. Lomba Desa/ Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a menggunakan indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Lomba Desa/ Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b menggunakan indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kategori Penilaian

Pasal 8

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah berupa skor yaitu :
 - a. Nilai A = skor 4;
 - b. Nilai B = skor 3;
 - c. Nilai C = skor 2;
 - d. Nilai D = skor 1;
- (2) Hasil penilaian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu :
 - a. Kategori A (Sangat Baik) = nilai 91 – 100;
 - b. Kategori B (Baik) = nilai 71 – 90;
 - c. Kategori C (Cukup Baik) = nilai 51 – 70;
 - d. Kategori D (Buruk) = nilai > 51

Pasal 9

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dijadikan salah satu indikator tambahan terhadap besaran pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa bantuan sosial dan/ atau hibah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan setelah kewajiban administrasi telah dilakukan;
- (2) Kewajiban administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu meliputi :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes dan/ atau Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan telah ditetapkan sesuai aturan;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada Bupati ;
 - d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD;
 - e. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPDes) kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 September 2012



Diundangkan di Demak
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 25

INDIKATOR LOMBA DESA/EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 DESA KECAMATAN, KABUPATEN DEMAK
 TAHUN 20.....

A. ORBITASI

1. Orbitasi Wilayah

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Desa atau sebutan lain/Kelurahan	1 > 6 jam 2 5 - 6 jam 3 3 - 4 jam 4 1 - 2 kam 5 < 1 jam 6 Ada di pusat kecamatan 7 Bantaran Sungai 8 Rawa banjir (tetapi bukan bantaran sungai) 9 Bebas banjir

2. Jarak Geografis

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Ke Gunung KM
2	Ke laut KM
3	Ke Sungai KM
4	Ke Pinggiran Hutan KM
5	Ke Pasar KM
6	Ke Pelabuhan KM
7	Ke Bandara KM
8	Ke Terminal KM
9	Ke tempat hiburan KM
10	Ke tempat wisata KM
11	Ke Kantor Polisi/Militer KM
12	Ke perbatasan Kabupaten KM
13	Ke perbatasan Provinsi KM
14	Ke perbatasan Negara KM
15	Ke Stasiun KM

3 Letak Geografis

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Kawasan Hutan	ada/ tidak ada
2	Kawasan Tambang	ada/ tidak ada
3	Kawasan Pantai	ada/ tidak ada
4	Kawasan Perbukitan/pegunungan	ada/ tidak ada
5	Kawasan Persawahan	ada/ tidak ada
6	Kawasan Perkebunan	ada/ tidak ada
7	Kawasan Peternakan	ada/ tidak ada
8	Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga	ada/ tidak ada
9	Kawasan saluran listrik tegangan tinggi	ada/ tidak ada
10	Kawasan rawan banjir	ada/ tidak ada
11	Kawasan Industri/pabrik	ada/ tidak ada
12	Kawasan Perkantoran	ada/ tidak ada
13	Kawasan rawan banjir	ada/ tidak ada
14	Kawasan Perdagangan	ada/ tidak ada
15	Kawasan kumuh	ada/ tidak ada
16	Kawasan Jasa Hiburan	ada/ tidak ada
17	Kawasan wisata	ada/ tidak ada
18	Kawasan Bantaran sungai	ada/ tidak ada
19	Kawasan longsor	ada/ tidak ada
20	Kawasan.....	ada/ tidak ada

4 Jarak ke pusat Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Ke pemerintahan Kecamatan KM
	Ke pemerintahan Kabupaten KM
	Ke Pemerintahan Propinsi KM

B DATA PENDUDUK

1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	0 - 12 Bulan orang orang
2	> 1 < 5 tahun orang orang
3	> 5 < 7 tahun orang orang
4	> 7 < 15 tahun orang orang
5	> 15 - 56 tahun orang orang
6	> 56 tahun keatas orang orang

2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jender

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Jumlah Penduduk Orang Orang
2	Jumlah Laki-Laki Orang Orang
3	Jumlah Perempuan Orang Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga KK KK

C. DATA TINGKAT PERKEMBANGAN

1 Pendidikan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jumlah penduduk		
		1 buta huruf Orang Orang
		2 tidak tamat SD/ sederajat Orang Orang
		3 tamat SD/ sederajat Orang Orang
		4 tamat SLTP/sederajat Orang Orang
		5 tamat SLTA/sederajat Orang Orang
		6 tamat D-1 Orang Orang
		7 tamat D-2 Orang Orang
		8 tamat D-3 Orang Orang
		9 Tamat S-1 Orang Orang
		10 Tamat S-2 Orang Orang
11 Tamat S-3 Orang Orang		
2	Wajib Belajar 9 Tahun dan Angka Putus Sekolah	Jumlah penduduk		
		1 Usia 7 - 15 tahun Orang Orang
		2 Usia 7 - 15 tahun masih sekolah Orang Orang
		4 usia 7 - 15 tahun putus sekolah Orang Orang
3	Prasarana Pendidikan	1 SLTA/sederajat buah buah
		2 SLTP/sederajat buah buah
		3 SD/sederajat buah buah
		4 Jumlah lembaga pendidikan agama buah buah
		5 Lembaga pendidikan lain (kursus/sejenisnya) buah buah

2 Kesehatan Masyarakat


NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Kematian Bayi	Jumlah bayi		
		1 lahir orang orang
		2 mati orang orang
2	Gizi dan Kematian Balita	Jumlah balita		
		1 bergizi buruk orang orang
		2 bergizi baik orang orang
		3 mati orang orang
3	Cakupan Imunisasi	1 polio 3 orang orang
		2 DPT-1 orang orang
		3 BCG orang orang
4	Angka Harapan Hidup	Umur meninggal	jumlah	jumlah
		65 tahun orang orang
		66 tahun orang orang
		81 tahun orang orang
	 tahun orang orang
	 tahun orang orang
5	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	1. Total rumah tangga dapat akses air bersih RT RT
		a Penggunaan air sumur pompa RT RT
		b Penggunaan air sumur gali RT RT
		c Penggunaan mata air RT RT
		d Penggunaan hidram umum RT RT
		e Penggunaan penampungan air hujan RT RT
		f Penggunaan embung RT RT
		g penggunaan perpipaan RT RT
		h Lainnya RT RT
		2 Total rumah tangga tidak mendapat akses air bersih RT RT
6	Kepemilikan Jamban	1 Total rumah tangga punya jamban/WC RT RT
		2 Total rumah tangga tidak punya jamban/WC RT RT
		3 Pengguna MCK RT RT

3 Ekonomi Masyarakat

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Pengangguran	Jumlah penduduk		
		1 Usia kerja 15 - 56 tahun orang orang
		2 Usia kerja 15 - 56 tahun tidak bekerja orang orang
		3 Wanita usia 15 - 56 tahun menjadi ibu rumah tangga orang orang
		4 usia > 15 tahun cacat shg. tidak dapat bekerja orang orang

2	Pendapatan	Sumber Pendapatan		
		1 Sektor Pertanian	Rp.	Rp.
		2 Sektor kehutanan	Rp.	Rp.
		3 Sektor perkebunan	Rp.	Rp.
		4 Sektor peternakan	Rp.	Rp.
		5 Sektor perikanan	Rp.	Rp.
		6 Perdagangan	Rp.	Rp.
		7 Jasa	Rp.	Rp.
		8 Penginapan/Hotel/sejenis	Rp.	Rp.
		9 Pariwisata	Rp.	Rp.
	10 Industri rumah tangga	Rp.	Rp.	
3	Kelembagaan Ekonomi	1 Pasar	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		2 Lembaga koperasi/sejenis	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		3 BUM Desa	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		4 Toko/kios	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		5 Warung makan	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		6 Angkutan	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		7 Pangkalan ojek, becak delman atau sejenis	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
4	Tingkat Kesejahteraan	1 Jumlah keluarga Kel Kel
		2 Jumlah Keluarga pra sejahtera Kel Kel
		3 Jumlah Keluarga sejahtera 1 Kel Kel
		4 Jumlah Keluarga sejahtera 2 Kel Kel
		5 Jumlah Keluarga sejahtera 3 Kel Kel
		6 Jumlah Keluarga sejahtera 3 plus Kel Kel

4 Keamanan dan Ketertiban

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Konflik Sara	1 Konflik antar kelompok kasus kasus
		2 Konflik antar etnis kasus kasus
		3 Konflik berbau agama kasus kasus
2	Perkelahian	1 Kasus Perkelahian kasus kasus
		2 Kasus Perkelahian yang menimbulkan korban jiwa kasus kasus
		3 Kasus Perkelahian yang menimbulkan luka parah kasus kasus
3	Pencurian dan Perampokan	1 Kasus pencurian/ perampokan kasus kasus
		2 Kasus pencurian/perampo kan dengan kekerasan kasus kasus
		3 Kasus pencurian/perampo kan dengan pelaku dari desa setempat kasus kasus
4	Perjudian	1 Kasus perjudian kasus kasus
5	Kasus Narkoba	1 Jumlah kasus narkoba yang pelakunya penduduk setempat kasus kasus 

		2 Jumlah penduduk yang menjadi korban narkoba kasus kasus
6	Prostitusi	1. Kasus Prostitusi kasus kasus
7	Pembunuhan	1 Kasus pembunuhan kasus kasus
		2 Kasus pembunuhan dengan korban penduduk setempat kasus kasus
		3 Kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat kasus kasus
8	Kejahatan Seksual	1 Kasus Perkosaan kasus kasus
		2 Kasus Perkosaan anak kasus kasus
		3 Kasus kehamilan di luar nikah kasus kasus
9	Kasus Kekerasan dalam rumah tangga	1 Terhadap istri kasus kasus
		2 Terhadap suami kasus kasus
		3 Terhadap anak kasus kasus
		4 Terhadap anggota keluarga yang lain. kasus kasus
10	Penculikan	1 Jumlah kasus penculikan kasus kasus
11	Partisipasi masyarakat dalam keamanan swakarsa	1 Jumlah Pos siskamling unit unit
		2 Jumlah anggota hansip orang orang
		3 Jumlah kelompok ronda klpk klpk

5 Partisipasi Masyarakat

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN	
1	Pemilihan Umum	1 Legislatif		
		a Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang	
		b Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang	
2	Pemilihan Kepala Daerah	2 Presiden/Wakil Presiden		
		a Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang	
		b Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang	
		1 Gubernur/Wakil Gubernur		
		a Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang	
		b Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang	
2 Bupati/Wakil Bupati				
a Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang			
b Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang			
3	Pemilihan Kepala Desa	Cara penentuan kepala desa/sebutan lain		dipilih/ ditunjuk
		a Jumlah penduduk memiliki hak pilih orang	
		b Jumlah penduduk menggunakan hak pilih orang	
4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	1 Jumlah Penduduk yang ikut dlm musrenbang orang Orang
		2 Jumlah peserta laki-laki orang Orang
		3 Jumlah peserta perempuan orang Orang
5	Kegotong royongan penduduk	1 Jumlah kegiatan gotong royong dalam membangun rumah kali Kali
		2 Jumlah kegiatan gotong royong dalam mengolah tanah kali Kali

	3	Jumlah kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan desa kali Kali
	4	Jumlah kegiatan gotong royong dalam membangun jembatan/jalan kali Kali
	5	Jumlah kegiatan gotong royong dalam membangun saluran irigasi kali Kali
	6	Jumlah kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana kali Kali
	7	Jumlah kegiatan gotong royong lainnya kali Kali
	8	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong kali Kali

6 Pemerintahan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Pemerintahan Desa	1 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		
		a Kantor	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		b Anggaran	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		c Buku data keputusan BPD	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		d Buku data anggota BPD	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		e Buku data kegiatan BPD	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		f Buku Sekretariat BPD	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		g Mesin ketik/Komputer	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		2 Pemerintahan Desa		
		a Gedung Kantor	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		b Buku Perangkat Desa	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		c Perangkat Desa	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		3 Administrasi Desa	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		a Administrasi umum	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		b Administrasikeuangan	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		c Administrasi penduduk	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		d Administrasi BPD	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		e Administrasi Pembangunan	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		f Administrasi lainnya	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		g Peta wilayah	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		4 Keuangan Desa		
		a APBD desa	Rp	Rp
		b Jumlah PAD Desa	Rp	Rp
		c Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp	Rp
		d Bantuan/hibah desa	Rp	Rp
		5 Akuntabilitas		
		a Pertanggung Jawaban Kades kepada Pemerintahan Desa	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		b Penyampaian keterangan tentang laporan pertanggungjawaban kepada BPD	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		c Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pokok-pokok pertanggung jawaban	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada

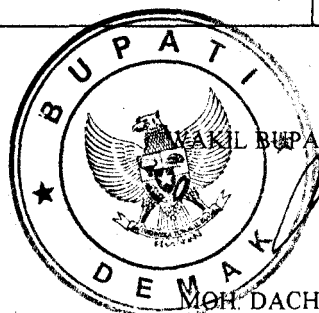
7 Lembaga Kemasyarakatan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEBERADAAN
1	Organisasi Perempuan	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif
2	Organisasi Pemuda	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif

3	Organisasi Profesi	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif
4	Organisasi Bapak	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif
5	Organisasi LKMD	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif
6	Organisasi gotong royong	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif
7	Karang Taruna	* Keberadaan Aktivitas	ada/ tidak ada aktif/tdk aktif
8	Lembaga Adat	* Lembaga Adat dalam pengelolaan hutan	ada/ tidak ada
		* Lembaga Adat dalam pengelolaan pertanian/irigasi	ada/ tidak ada
		* Lembaga Adat dalam pengelolaan laut/pantai	ada/ tidak ada
		* Lembaga Adat dalam penyelesaian konflik warga	ada/ tidak ada
		* Lembaga Adat perkawinan	ada/ tidak ada
		* Lembaga Adat	ada/ tidak ada
		* Lembaga Adat	ada/ tidak ada

8 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TAHUN N-2	TAHUN N-1
1	Realisasi 10 Program Pokok PKK	1 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Kegiatan Kegiatan
		2 Gotong Royong Kegiatan Kegiatan
		3 Pangan Kegiatan Kegiatan
		4 Sandang Kegiatan Kegiatan
		5 Perumahan dan Tata laksana rumah tangga, Kegiatan Kegiatan
		6 Pendidikan dan Ketrampilan Kegiatan Kegiatan
		7 Kesehatan Kegiatan Kegiatan
		8 Pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan Kegiatan
		9 Pelestarian lingkungan hidup Kegiatan Kegiatan
		10 Perencanaan sehat Kegiatan Kegiatan
2	Organisasi PKK	Kelengkapan		
		a Kelompok Kerja	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada
		b Kelompok Dasa Wisma	ada/ tidak ada	ada/ tidak ada



WAKIL BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

PENILAIAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KATEGORI NILAI			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
A	ADMINISTRASI UMUM				
1	Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	ada tapi tidak isi/ tidak ada
2	Buku Data Keputusan Kepala Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
3	Buku Inventaris Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
4	Buku Data Aparat Pemerintah Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
5	Buku Data Tanah Milik Desa/ Tanah Kas Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
6	Buku Data Tanah di Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
7	Buku Agenda	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
8	Buku Ekspedisi	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
B	ADMINISTRASI PENDUDUK				
1	Buku Data Induk Penduduk Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
2	Buku Data mutasi Penduduk Desa	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
3	Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir bulan	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
4	Buku Data Penduduk Sementara	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
C	ADMINISTRASI KEUANGAN DESA				
1	Buku Anggaran Penerimaan	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
2	Buku Anggaran Belanja Tidak Langsung	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
3	Buku Anggaran Belanja Langsung	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
4	Buku Kas Umum	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
5	Buku Kas Pembantu Penerimaan	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
6	Buku Kas Pembantu Belanja Tidak Langsung	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
7	Buku Kas Pembantu Belanja Langsung	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
D	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
1	Buku Rencana Pembangunan	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
2	Buku Kegiatan Pembangunan	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
3	Buku Inventaris Proyek	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
4	Buku Kader pembang./pemberdayaan masy	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KATEGORI NILAI			
		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6
E	ADMINISTRASI BPD				
1	Buku Data Anggota BPD	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
2	Buku Data Keputusan BPD	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
3	Buku Data Kegiatan BPD	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
4	Buku Agenda BPD	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
5	Buku Ekspedisi	Ada dan Lengkap terisi	ada dan Sebagian besar terisi	Ada tapi sebagian kecil terisi	tidak ada
F	ADMINISTRASI DESA YANG LAIN				
1	APBDES	Ditetapkan tepat waktu dan telah dievaluasi oleh camat	Ditetapkan Tepat waktu tetapi blm dievaluasi oleh camat	Ditetapkan tidak sesuai dengan waktunya	belum ditetapkan
2	SPJ	Dilaksanakan sesuai Perbub dan tepat waktu	Dilaksanakan sesuai Perbub tetapi tidak tepat waktu	Sebagian telah dilaksanakan sesuai Perbub	Blm membuat atau tidak melaksanakan sesuai Perbub
3	Pertanggungjawaban Kades kpd Pemerintah diatasnya (LPPDes)	Dilaksanakan tepat waktu	Dilaksanakan Tetapi terlambat	Dilaksanakan jauh dari waktu yang ditentukan	Tidak melaksanakan
4	LKPJ Kades kepada BPD	Dilaksanakan tepat waktu	Dilaksanakan Tetapi terlambat	Dilaksanakan jauh dari waktu yang ditentukan	Tidak melaksanakan
5	ILPPDes kepada Masyarakat	Dilaksanakan tepat waktu	Dilaksanakan Tetapi terlambat	Dilaksanakan jauh dari waktu yang ditentukan	Tidak melaksanakan
6	Penyimpanan Dana APBDes	Seluruhnya disimpan di Bank Pemerintah	Sebagian Besar disimpan di Bank Pemerintah	Sebagian kecil disimpan di Bank Pemerintah	Tidak disimpan di Bank Pemerintah
7	Pengamanan Aset Tanah Desa	Seluruh tanah desa telah bersertifikat	Sebagian besar tanah desa bersertifikat	sebagian kecil tanah desa bersertifikat	belum yang bersertifikat
8	Pemberhentian perangkat desa	Tepat waktu dan sesuai aturan	terlambat sampai dengan 2 bulan dari tanggal pemberhentian	Terlambat lebih dari 2 bulan sampai 6 bulan	terlambat lebih dari 6 bulan
9	Administrasi lainnya :				
	a. Perdes Lelang Tanah Bondo Desa	Dibuat sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat kurang sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat tidak sesuai aturan perundang-undangan	Tidak dibuat
	b. Perdes SOTK	Dibuat sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat kurang sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat tidak sesuai aturan perundang-undangan	Tidak dibuat
	c. Perdes Ked Keu Kades dan Pergkt Ds	Dibuat sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat kurang sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat tidak sesuai aturan perundang-undangan	Tidak dibuat
	d. Perdes Lainnya	Dibuat sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat kurang sesuai aturan perundang-undangan	Dibuat tidak sesuai aturan perundang-undangan	Tidak dibuat
	e. Surat menyurat	Teradministrasi dengan baik	Teradministrasi cukup baik	Teradministrasi kurang baik	Tidak teradministrasi
	f. Disposisi Kepala Desa	Sudah memakai lembar disposisi	Sebagian besar sudah memakai disposisi	Sebagian kecil sudah memakai disposisi	Tidak memakai disposisi
10	Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan	Lunas 100 %	Terbayarkan 76 - 99 %	Terbayarkan 36 - 75 %	Terbayarkan 0 - 35 %
11				
12				

Keterangan Nilai

- A : Nilai 4
- B : Nilai 3
- C : Nilai 2
- D : Nilai 1

Penghitungan nilai akhir

Kategori Nilai

- <51 : D = buruk
- 51 - 71 : C = Cukup
- 71 - 90 : B = Baik
- 91 - 100 : A = Sangat Baik

$\frac{\text{total nilai}}{152} \times 100 = \text{Nilai Akhir}$

